

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sebagai daerah yang otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pengelolaan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004 yang merupakan revisi terhadap UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kedua Undang-Undang di bidang otonomi daerah tersebut berdampak pada terjadinya pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah. Adapun salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2002). Analisis rasio keuangan merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang dituangkan dalam APBD (Halim, 2002).

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dijadikan sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran. Oleh karena itu, pemerintah harus bertindak efektif dan efisien dalam mengelola keuangan daerahnya. Untuk memberikan jaminan pengalokasian sumber daya yang ada secara ekonomis, efisien dan efektif, maka informasi akuntansi manajemen sangat penting dimiliki, seiring dengan timbulnya paradigma baru organisasi pemerintahan yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat dan kepentingan publik. Peningkatan kualitas pelayanan hanya bisa tercapai dengan pemanfaatan dana yang terarah untuk mengoptimalkan pelayanan publik melalui proses penganggaran yang baik. Dalam UU RI Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa adanya sumber-sumber dalam melakukan pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah. sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah tersebut mencakup pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah dan pinjaman daerah.

Guna menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dapat dilakukan dengan menganalisa laporan keuangan yang sudah tersedia. Analisis laporan keuangan merupakan suatu usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah Pemerintah Daerah dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Keberadaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sangat penting untuk menciptakan budaya transparansi dan akuntabilitas publik dalam rangka kepentingan menciptakan *good governance*.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah salah satu instansi pemerintah yang bertugas dalam bidang industri dan perdagangan di wilayah Kabupaten Sleman. Pengukuran kinerja yang dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman yaitu menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP itu sendiri merupakan laporan yang memuat tentang perencanaan dan pencapaian kinerja yang menggambarkan tentang keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi selama tahun yang bersangkutan, serta hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Hal tersebut merupakan dampak ditetapkannya kebijakan oleh

presiden melalui instruksi UU Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sesuai dengan kebijakan tersebut setiap instansi pemerintah di seluruh tingkatan dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan atas pelaksanaan kegiatan dan pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara transparan kepada publik.

Dari uraian diatas, penulis akan membahas tentang penilaian dan pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur kinerjanya baik dari aspek keuangan maupun non keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. Karena kedua aspek tersebut saling berhubungan, maka penulis perlu melakukan pengukuran kinerja menggunakan perhitungan rasio keefektivitasan dan keefisienan untuk mengetahui bagaimana kualitas dari pelayanan jasa yang diberikan dan kualitas pengelolaan keuangannya. Berdasarkan hal tersebut, penulis menyusun Tugas Akhir dengan judul **“ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2014-2016”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis sampaikan sebelumnya, maka masalah pokok yang dibahas dalam penelitian tugas akhir ini adalah: “Bagaimana tingkat kemampuan kinerja keuangan dan non keuangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2016?”

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan Magang**

#### **1.3.1. Tujuan Pelaksanaan Magang**

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk menganalisis kinerja keuangan dan non keuangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sleman Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2016.

#### **1.3.2. Manfaat Pelaksanaan Magang**

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh pengetahuan dan pengalaman mengenai dunia kerja serta memverifikasi ilmu teori yang diperoleh dalam proses kuliah dengan praktek kerja sebenarnya.
2. Menambah wawasan tentang pengukuran kinerja keuangan maupun non keuangan yang ada dalam instansi pemerintah khususnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman.
3. Memperoleh gambaran dunia kerja yang nantinya berguna bagi penulis apabila telah menyelesaikan pendidikan kuliah, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan dunia kerja.

## 1.4. Rencana Penulisan

### 1.4.1. Jadwal Kegiatan

Pelaksanaan magang dilaksanakan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sleman yang bertempat di Jalan Parasmya, Beran, Tridadi, Beran Kidul, Tridadi, Kec. Sleman, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Tabel 1.1 Jadwal Magang dan Penyusunan Tugas Akhir**

NO	KEGIATAN	AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penulisan TOR																
2	Pengajuan TOR ke lokasi magang																
3	Pelaksanaan magang																
4	Bimbingan dengan dosen pembimbing																
5	Penyusunan tugas akhir																

### 1.4.2. Rencana Isi

Untuk mempermudah dalam penulisan tugas akhir ini, penulis membuat rencana isi dalam empat bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang sesuai dengan kebutuhan penulis. Secara garis besar pokok pembahasannya ada sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat pelaksanaan magang, rencana isi penulisan yang mencakup jadwal pelaksanaan magang dan rencana isi.

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini meliputi uraian berbagai teori yang akan dipergunakan untuk memecahkan masalah.

## **BAB III : ANALISIS DESKRIPTIF**

Pada bab ini penulis menjelaskan gambaran umum tempat magang dilaksanakan baik secara data umum maupun data khusus.

## **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini, penulis mencoba mengambil kesimpulan dan memberikan saran-saran berdasarkan dari pengumpulan data dan pembahasan yang dilakukan dimana diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sleman di masa yang akan datang.